



## **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### **KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 888 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016**

##### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 25 Nopember 2015

**Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**M. HARDI**

*Handwritten note on the right margin: "Dik. Kabupaten Belitung Timur No. 1/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah"*

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Perubahan tarif pajak		√	- UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	DPPKAD Kab. Beltim	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)	
2	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Penambahan/Perubahan tarif retribusi, antara lain: 1. Sewa excavator mini; 2. Sewa mobil mobil tangki; 3. Sewa bulldozer mini; dan 4. Sewa bulldozer 5. Pemanfaatan Laboratorium BLHD. 6. Penjualan benih ikan.	√		- UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√		- DCKPR; - BLHD; dan - DKP Kab. Beltim  (Koordinator Pelaksana DPPKAD)	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)	

3	Perda	Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan	Persyaratan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan	√	-	√	1. DCKPR; 2. Bappeda; 3. BLHD; 4. BPPPT; 5. Bina Marga dan SDM; dan 6. Bagian Ekbang.	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)
4	Perda	Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persyaratan kawasan siap bangun dan/atau lokasi siap bangun pendanaan perumahan	√	-	√	1. DCKPR; 2. Bappeda; 3. BLHD; 4. BPPPT; 5. Bina Marga dan SDM; dan 6. Bagian Ekbang.	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)
5	Perda	Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal Saham PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Penyertaan modal daerah	√	- UU No 17 Tahun 2003 - UU No 1 Tahun 2004 - PP No 58 Tahun 2005 - PP No 1 Tahun 2008	√	DPPKAD Kab. Beltim	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)
6	Perda	Retribusi Penyediaan Air Minum	Retribusi penjualan produksi usaha daerah sistem penyediaan air minum	√	- UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√	DCKPR Kab. Beltim	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)
7	Perda	Reklamasi dan Pascatambang	Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang	√	- UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - PP No 78 Tahun 2010	√	DPRD Kab. Beltim	Masa Persidangan I (1 Januari – 30 April 2016)

						tentang Reklamasi dan Pascatambang					
8	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur	Perubahan Pasal 8 ayat (2), bahwa dalam melaksanakan kerjasama BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur tidak diwajibkan untuk melalui persetujuan DPRD.		√	- UU No 40 Tahun 2007		√	Bagian Ekbang Setda. Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei - 30 Agustus 2016)	
9	Perda	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan umum</li> <li>- Kedudukan, ruang lingkup, dan jangka waktu perencanaan</li> <li>- Prinsip, visi, misi</li> <li>- Tujuan, konsep, dan kebijakan</li> <li>- Strategi pembangunan kepariwisataan</li> <li>- Rencana perwilayahan pariwisata daerah</li> <li>- Pelaksanaan dan pengendalian</li> <li>- Pembiayaan</li> <li>- Ketentuan penutup</li> </ul>	√		- UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	√		Bappeda Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei - 30 Agustus 2016)	
10	Perda	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Badan	Penyertaan modal daerah	√		- UU No 23 Tahun 2014	√		Bag. Ekbang Setda kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei - 30 Agustus 2016)	

		Usaha Milik Daerah PT.Pembangunan Belitung Timur								
11	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021	Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang disingkat RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan 5 Tahun yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program SKPS, program kewilayahan, dan rencana kerjadalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.	√		- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√		Bappeda Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei – 30 Agustus 2016)
12	Perda	Pelestarian Kebudayaan, Cagar Budaya, dan Museum	Pengamanan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian, budaya, cagar budaya, dan museum	√		- UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	√		Disbudpar kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei – 30 Agustus 2016)
13	Perda	Penyelenggaraan Kesehatan Daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung Timur	√		- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	√		DPRD Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei – 30 Agustus 2016)

14	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum</li> <li>- Asas dan Tujuan</li> <li>- Penyelenggaraan</li> <li>- Kawasan Tanpa Rokok</li> <li>- Peran Serta Masyarakat</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>- Sanksi Administrasi</li> <li>- Penyidikan</li> <li>- Ketentuan Pidana</li> <li>- Ketentuan Penutup</li> </ul>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau</li> </ul>	√		Dinkes Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September – 31 Desember 2016)	
15	Perda	Adat Perkawinan Melayu Belitong di Kabupaten Belitong Timur	Prosesi perkawinan di Belitong Timur	√		-	√		Disbudpar Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September – 31 Desember 2016)	
16	Perda	Pembangunan Berwawasan Kependudukan Di Kabupaten Belitong Timur	Pelaksanaan UU 52 Tahun 2009 untuk melaksanakan pembangunan Berwawasan Kependudukan	√		- UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga	√		BKKBD Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September – 31 Desember 2016)	
17.	Perda	Kepariwisataaan	Kepariwisataaan di Belitong Timur	√		- UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	√		Disbudpar Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September – 31 Desember 2016)	
18.	Perda	Pembangunan Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum</li> <li>- Asas, fungsi dan tujuan</li> <li>- Tugas wewenang dan tanggung jawab Pemda</li> <li>- Peran,</li> </ul>	√		- UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	√		Dispora Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September – 31 Desember 2016)	

			tanggungjawab dan hak pemuda - Perencanaan pemuda - Pelayanan kepemudaan - Oraganisasi kepemudaan - Penghargaan - Prasarana dan sarana kepemudaan - Lembaga permodalan dan kewirausahaan pemuda - Data dan informasi kepemudaan - Pendanaan - Pembinaan dan pengawasan - Pelaporan - Sanksi administratif							
19.	Perda	SOTK	Perubahan SOTK SKPD Kabupaten Belitung Timur	-	-	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Bagian Organisasi Setda Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September – 31 Desember 2016)



## II. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Perda	Pertanggung jawaban APBD TA.2015	Laporan Keuangan TA.2014 (Auditet) - LRA - Neraca - LAK - CALK	√				√	DPPKAD Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei - 30 Agustus 2016)	
2	Perda	Perubahan APBD TA.2016	- Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (PAPBD) - DPPA - SKPD		√			√	DPPKAD Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei - 30 Agustus 2016)	
3	Perda	APBD TA.2017	- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) - DPA - SKPD	√				√	DPPKAD Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September - 31 Desember 2016)	

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
M. HARDI